

**LAPORAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG PALOPO**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024

(Audited)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Palopo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palopo, 07 Mei 2025

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Palopo



Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Iqbal Firzada





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO**

JALAN ANDI KAMBO NO. 55, PALOPO, SULAWESI SELATAN 91921; TELEPON (0471) 327501, 22607; FAKSIMILE (0471) 21360; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id; POS-EL kpknlpalopo@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palopo, 07 Mei 2025

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Palopo



Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Iqbal Firzada



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo Periode Tanggal 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Periode Tanggal 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.047.226.081 atau sebesar 125% dari target PNBPN sebesar Rp 2.434.828.000.

Realisasi Belanja Negara pada Periode Tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.413.161.998 atau mencapai 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.475.541.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.597.860.459 dan Rp3.959.322.004 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp58.001.637 dan Rp70.541.342; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.539.858.822 dan Rp3.888.780.662; dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp0.

Kemudian nilai Kewajiban pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp49.538.170 dan Rp59.420.816, yang semua komponennya terdiri dari jumlah kewajiban jangka pendek, dan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.548.322.289 dan Rp3.899.901.188.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.043.383.717 dan Rp3.012.528.088, sedangkan jumlah beban sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.764.740.897 dan Rp1.683.351.910, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.278.642.820 dan Rp1.329.176.178. Surplus Kegiatan Non Operasional senilai Rp3.842.364 dan Rp0, Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.282.485.184 dan Rp1.329.176.178.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada awal periode Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp3.899.901.188 dan Rp3.935.757.139 ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.282.485.184 dan Rp1.329.176.178 kemudian dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.634.064.083 dan Rp1.388.072.129, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp3.548.322.289 dan Rp3.899.901.188, mengalami penurunan sebesar 9,02%.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode Tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.434.828.000	3.047.226.081	125,15	3.017.376.573
JUMLAH PENDAPATAN		2.434.828.000	3.047.226.081	125,15	3.017.376.573
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	1.444.642.000	1.384.333.948	95,83	1.271.541.230
Belanja Modal	B.5	30.899.000	28.828.050	93,30	142.644.800
Belanja Bantuan Sosial	B.6			-	-
JUMLAH BELANJA		1.475.541.000	1.413.161.998	95,77	1.414.186.030

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO NERACA

PER 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	38.820.071	50.471.382
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.4		
Persediaan	C.5	19.181.566	20.069.960
Jumlah Aset Lancar		58.001.637	70.541.342
ASET TETAP			
Tanah	C.6	1.592.178.000	1.592.178.000
Peralatan dan Mesin	C.7	4.099.141.399	3.834.863.349
Gedung dan Bangunan	C.8	1.601.299.988	1.601.299.988
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(3.752.760.565)	(3.139.560.675)
Jumlah Aset Tetap		3.539.858.822	3.888.780.662
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.10	-	-
Aset Lain-Lain	C.11	-	235.450.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	-	(235.450.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3.597.860.459	3.959.322.004
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.13	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	49.538.170	59.420.816
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.15	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		49.538.170	59.420.816
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.16	3.548.322.289	3.899.901.188
JUMLAH EKUITAS DANA		3.548.322.289	3.899.901.188
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.597.860.459	3.959.322.004

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.043.383.717	3.012.528.088
JUMLAH PENDAPATAN	3.043.383.717	3.012.528.088
BEBAN		
Beban Pegawai	-	-
Beban Persediaan	39.008.514	27.720.700
Beban Barang dan Jasa	780.790.440	789.537.174
Beban Pemeliharaan	220.574.870	180.287.951
Beban Perjalanan Dinas	346.617.183	259.985.315
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Beban Bantuan Sosial		-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	377.749.890	425.820.770
Beban Penyisihan Piutang Tak	-	-
JUMLAH BEBAN	1.764.740.897	1.683.351.910
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1.278.642.820	1.329.176.178
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.842.364	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-
Defisit Selisih Kurs	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.842.364	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1.282.485.184	1.329.176.178
POS LUAR BIASA		
Pendapatan PNBPN	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-
Beban Persediaan	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	1.282.485.184	1.329.176.178

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	3.899.901.188	3.935.757.139
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1.282.485.184	1.329.176.178
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN			-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3		-
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN	E.4		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.5		-
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.6		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.7		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.8	-	23.040.000
KOREKSI ATAS BEBAN	E.9	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.10	-	-
Jumlah Lain-Lain		1.282.485.184	1.352.216.178
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(1.634.064.083)	(1.388.072.129)
KENAIKAN(PENURUNAN) EKUITAS		(351.578.899)	(35.855.951)
EKUITAS AKHIR	E.11	3.548.322.289	3.899.901.188

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo terbentuk pada tahun 2005 dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Palopo. Pada tahun 2006, terjadi reorganisasi dengan adanya perubahan nomenklatur dari DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Perubahan tersebut juga mengakibatkan berubahnya nomenklatur KP2LN Palopo menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo. KPKNL Palopo merupakan instansi vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Saat ini KPKNL Palopo menempati gedung milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo yang beralamat di Jalan Andi Kambo Nomor 55 Palopo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Palopo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. KPKNL Palopo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Wilayah kerja KPKNL Palopo meliputi 7 (tujuh) kota dan/atau kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang. Dalam menjalankan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, KPKNL Palopo memberikan pelayanan terkait kekayaan negara dan lelang kepada 123 (seratus dua puluh tiga) satuan kerja. KPKNL Palopo selalu menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna layanan.

Sebagai kantor pelayanan, KPKNL Palopo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu berusaha meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para pengguna jasa layanan serta mendukung tercapainya visi dan misi DJKN sesuai Renstra Tahun 2020-2024 yakni Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Palopo sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai Misi mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dalam usaha mewujudkan visi dan misi yang diemban, KPKNL Palopo mempunyai motto “IDAMAN” yang merupakan singkatan dari “Ikhlas dan Andal Dalam Melayani”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Tanggal 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Pendapatan-LRA KPKNL Palopo seluruhnya bersumber dari pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	a. Satu Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	b. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) Bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) Bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) Bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

Bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas Bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Bea Lelang	746.124.000	746.124.000
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	2.166.000	2.166.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.686.538.000	1.686.538.000
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan	2.434.828.000	2.434.828.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	1.444.642.000	1.444.642.000
Belanja Modal	30.899.000	30.899.000
Jumlah Belanja	1.475.541.000	1.475.541.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp3.047.226.081*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.047.226.081, dengan estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.434.828.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Bea Lelang	746.124.000	907.274.702	121,60
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	2.166.000	251.195	11,60
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.686.538.000	2.126.398.320	126,08
Pendapatan Jasa Lainnya	-	1.500.000	-
Pendapatan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pendapatan Sewa tanah,gedung dan bangunan	-	-	-
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	3.842.364	-
Pendapatan anggaran lain-lain	-	7.959.500	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	2.434.828.000	3.047.226.081	125,15

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp1.413.161.998 Realisasi Belanja instansi pada untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.413.161.998. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.444.642.000	1.384.333.948	95,83
Belanja Modal	30.899.000	28.828.050	93,30
Total Belanja Kotor	1.475.541.000	1.413.161.998	95,77
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	1.475.541.000	1.413.161.998	95,77

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Total Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 0,12% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan anggaran pada belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.384.333.948	1.271.541.230	8,87
Belanja Modal	28.828.050	142.644.800	(79,79)
Jumlah	1.413.161.998	1.414.186.030	(0,07)

Belanja Pegawai
Rp 0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2024 tidak ada dikarenakan belanja pegawai dianggarkan secara terpusat.

Belanja Barang
Rp1.384.333.948

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.384.333.948 dan Rp1.271.541.230. Realisasi Belanja

Barang TA 2024 mengalami kenaikan 8,87% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang Triwulan III TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	639.775.123	671.340.417	(4,70)
Belanja Barang Non Operasional	27.735.900	14.509.500	91,16
Belanja Jasa	111.510.752	105.437.047	5,76
Belanja Pemeliharaan	220.574.870	180.287.951	22,35
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	346.617.183	259.985.315	33,32
Belanja Barang Persediaan	38.120.120	39.981.000	-
Jumlah Belanja Kotor	1.384.333.948	1.271.541.230	8,87
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1.384.333.948	1.271.541.230	8,87

*Belanja Modal Rp
Rp28.828.050*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp28.828.050 dan Rp142.644.800. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena terdapat penurunan pagu alokasi yang diberikan oleh Kantor Pusat.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.828.050	142.644.800	-79,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	28.828.050	142.644.800	-79,79
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	28.828.050	142.644.800	-79,79

B.5.1 Belanja Perangkat Data dan Pengolah Informasi

Tidak terdapat realisasi Belanja Perangkat Data dan Pengolah Informasi TA 2024 hal ini disebabkan KPKNL Palopo tidak diberikan anggaran untuk belanja modal Perangkat Data dan Pengolah Informasi.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp28.828.050, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp142.644.800 atau setara dengan penurunan sebesar 79,79%. Hal ini disebabkan tahun 2024 KPKNL Palopo hanya diberikan pagu sebesar Rp30.899.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024

URAIAN	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	
Peralatan dan Mesin dan inventaris	28.828.050	142.644.800
Jumlah Belanja Kotor	28.828.050	142.644.800
Pengembalian	-	-
Jumlah Belanja	28.828.050	142.644.800

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Seluruh kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP telah dipertanggung-jawabkan atau sudah disetorkan ke Rekening Kas Negara. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2024	TA 2023
Uang Tunai di Brankas	-	-
Kekurangan Uang Tunai di Brankas	-	-
Saldo di Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp38.820.071*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp38.820.071 dan Rp50.471.382.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang tercatat pada neraca merupakan kas lainnya di bendahara penerimaan yang bukan berasal dari setoran bea lelang dan biad yang belum disetor. Kas lainnya sebesar Rp27.410.500 merupakan uang jaminan yang gagal dikembalikan karena nomor rekening peserta tidak aktif, saat ini sedang menunggu surat permohonan pengembalian dengan nomor rekening yang aktif dari peserta, sebesar 11.409.571 merupakan selisih yang masih dalam proses rekonsiliasi dan konfirmasi.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	38.820.071	50.471.382
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	38.820.071	50.471.382

Persediaan

Rp19.181.566

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp19.181.566 dan Rp20.069.960.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi	19.181.566	20.069.960
Bahan untuk pemeliharaan		
Pita Cukai, materai, dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	19.181.566	20.069.960

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp1.592.178.000

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.592.178.000 dan Rp1.592.178.000. Rincian tanah per per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	740 m2	Jl. Ahmad Razak	1.062.270.000
2	431 m2	Jl. Pongsimpin	331.008.000
3	200 m2	Jl. Lagaligo	198.900.000
Jumlah			1.592.178.000

Peralatan dan

Mesin

Rp 4.099.141.399

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp4.099.141.399 dan Rp3.834.863.349. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024		3.834.863.349
Mutasi tambah:		264.278.050
Pembelian		28.828.050
Transfer Masuk		
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif		235.450.000
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Keluar		-
Penghentian dari Penggunaan		
Saldo per 31 Desember 2024		4.099.141.399
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		(3.523.644.689)

Mutasi penambahan peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian terdiri dari 3 unit Meubelair Lainnya, 1 unit Karpas, 1 unit Tempat Sampah, 1 unit Microphone/Wireless MIC, dan 1 unit Camera Digital.

*Gedung dan
Bangunan
Rp1.601.299.988*

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.601.299.988 dan Rp1.601.299.988. Selama tahun 2024 tidak terjadi mutasi tambah maupun mutasi kurang, sehingga saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sama. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	1.601.299.988
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Januari 2024	1.601.299.988
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	229.115.876
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.372.184.112

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp3.752.760.565*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp3.752.760.565 dan Rp3.139.560.675. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.099.141.399	3.523.644.689	575.496.710
2	Gedung dan Bangunan	1.601.299.988	229.115.876	1.372.184.112
Jumlah		5.700.441.387	3.752.760.565	1.947.680.822

Aset Lain-Lain Rp0

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0 dan Rp235.450.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	235.450.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	
- reklasifikasi ke aset tetap	235.450.000
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp235.450.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya serta adanya normalisasi aset. Akumulasi

penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 disebabkan karena di tahun 2024 dilakukan reklasifikasi aset yang sebelumnya tercatat sebagai aset lain-lain menjadi aset tetap (penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif).

Utang kepada Pihak Ketiga Rp49.538.170

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp49.538.170 dan Rp59.420.816. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas Bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Hak Penyerah Piutang yang belum dipindahbukukan ke Penyerah Piutang		
Uang Jaminan Lelang yang Belum diambil		
Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi (Pihak Ketiga)	38.820.071	
Hasil Bersih Lelang yang belum di transfer ke pihak yang berhak	-	
Kelebihan di Rekening Penampung Lelang		
Kelebihan di Rekening Penampung Piutang		
Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan non eksekusi wajib milik kementerian/lembaga yang belum di transfer		
Pph yang belum disetorkan	-	
Lain-lain Lelang		
Lain-lain Piutang		
Tagihan Kartu Kredit	-	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	10.718.099	
Total	49.538.170	

Ekuitas

Rp3.548.322.289

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.548.322.289 dan Rp3.899.901.188. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp3.043.383.717

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.043.383.717 dan Rp3.012.528.088. Pendapatan utama KPKNL Palopo Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Bea Lelang, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, dan Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara. Sementara pendapatan lainnya terdiri dari Pendapatan Anggaran Lain-lain, Pendapatan dari Pemindahtangan BMN, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Lelang yang tidak diambil oleh yang berhak, dan Pendapatan Jasa Lainnya.

Beban Pegawai

Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai dibayarkan secara terpusat sehingga tidak terdapat beban pegawai.

*Beban
Persediaan
Rp39.008.514*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp39.008.514 dan Rp27.720.700. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode Tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Periode Tanggal 31 Desember
2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	39.008.514	27.720.700	40,72
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		0	-
Jumlah Beban Persediaan	39.008.514	27.720.700	40,72

*Beban Barang
dan Jasa
Rp780.790.440*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp780.790.440 dan Rp789.537.174. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode Tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode Tanggal 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	533.235.123	481.939.980	10,64
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22.496.000	0	#DIV/0!
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.653.500	15.266.000	-43,32
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	76.104.000	132.840.000	-42,71
Beban Bahan	27.735.900	14.509.500	91,16
Beban Langganan Listrik	101.585.341	94.369.239	7,65
Beban Langganan Telepon	10.080.576	10.090.018	-0,09
Beban Jasa Profesi	900.000	0	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	0	32.203.320	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	8.319.117	0,00
Jumlah	780.790.440	789.537.174	-1,11

Beban Pemeliharaan Rp220.574.870

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp220.574.870 dan Rp180.287.951. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Periode Tanggal 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.030.000	31.413.644	40,16
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.544.870	148.874.307	18,59
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	220.574.870	180.287.951	22,35

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp346.617.183*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp346.617.183 dan Rp259.985.315. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode Tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode Tanggal 31
Desember 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	334.513.183	251.713.315	32,89
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.104.000	8.272.000	46,32
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		0	-
Jumlah	346.617.183	259.985.315	33,32

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp377.749.890*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp377.749.890 dan Rp425.820.770. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi untuk Periode Tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode Tanggal
31 Desember 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	343.868.798	393.867.674	-12,69%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.881.092	31.953.096	6,03%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah Penyusutan	377.749.890	425.820.770	-11,29%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	377.749.890	425.820.770	-11,29%

*Surplus
Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp3.842.364*

D.8 Surplus Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.842.364 dan Rp0. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya yang tercatat di tahun 2024 berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu adalah penerimaan negara yang terjadi karena terdapat pengembalian belanja barang belanja tahun anggaran yang lalu.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp3.899.901.188*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.899.901.188 dan Rp 3.935.757.139.

Surplus LO

Rp1.282.485.184

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.282.485.184 dan Rp1.329.176.178. Surplus LO merupakan selisih tambah antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Tahun

Berjalan Rp0

E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Merupakan Penyesuaian Nilai persediaan sebesar Rp0.

Transaksi antar

Entitas

Rp1.634.064.083

E.4 Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas Merupakan Penyesuaian Nilai entitas pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.634.064.083 dan Rp1.388.072.129.

Ekuitas Akhir

Rp3.548.322.289

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.548.322.289 dan Rp 3.899.901.188.

F. PENGUNGKAPAN KEJADIAN PENTING.

- 1) Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 116,40, meningkat 1,98% dibanding tahun 2023 sebesar 114,13.

2) Dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian Lembaga TA 2024 sesuai dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 serta melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-15/KN/KN.1/2024 tanggal 12 November 2024 hal Penghematan Belanja Perjalanan Dinas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo melaksanakan revisi halaman IV.a DIPA dengan besaran blokir belanja perjalanan dinas sebesar Rp8.082.000.

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN CETAKAN E-REKON

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO 119944

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:04 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,475,541,000	1,413,161,998	(62,379,002)	95.77	1,496,611,000	1,414,186,030	(82,424,970)	94.49
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PALOPO, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAF'AN WIDIARSO RAFID
NIP 197408071995031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALOPO

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:03 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,043,383,717	3,012,528,088	30,855,629	1.024
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,043,383,717	3,012,528,088	30,855,629	1.024
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,043,383,717	3,012,528,088	30,855,629	1.024
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	39,008,514	27,720,700	11,287,814	40.72
Beban Barang dan Jasa	780,790,440	789,537,174	(8,746,734)	(1.108)
Beban Pemeliharaan	220,574,870	180,287,951	40,286,919	22.346
Beban Perjalanan Dinas	346,617,183	259,985,315	86,631,868	33.322
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALOPO

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:03 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	377,749,890	425,820,770	(48,070,880)	(11.289)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,764,740,897	1,683,351,910	81,388,987	4.835
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1,278,642,820	1,329,176,178	(50,533,358)	(3.802)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,842,364	0	3,842,364	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,842,364	0	3,842,364	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,842,364	0	3,842,364	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1,282,485,184	1,329,176,178	(46,690,994)	(3.513)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	1,282,485,184	1,329,176,178	(46,690,994)	(3.513)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PALOPO, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAF'AN WIDIARSO RAFID
NIP 197408071995031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALOPO

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:03 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,899,901,188	3,935,757,139	(35,855,951)	(0.91)
SURPLUS/DEFISIT-LO	1,282,485,184	1,329,176,178	(46,690,994)	(3.51)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	23,040,000	(23,040,000)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	23,040,000	(23,040,000)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,634,064,083)	(1,388,072,129)	(245,991,954)	17.72
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(351,578,899)	(35,855,951)	(315,722,948)	880.53
EKUITAS AKHIR	3,548,322,289	3,899,901,188	(351,578,899)	(9.02)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PALOPO, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAF'AN WIDIARSO RAFID
NIP 197408071995031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:04 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	38,820,071	50,471,382	(11,651,311)	(23.08)
Persediaan	19,181,566	20,069,960	(888,394)	(4.43)
JUMLAH ASET LANCAR	58,001,637	70,541,342	(12,539,705)	(17.78)
ASET TETAP				
Tanah	1,592,178,000	1,592,178,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,099,141,399	3,834,863,349	264,278,050	6.89
Gedung dan Bangunan	1,601,299,988	1,601,299,988	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,752,760,565)	(3,139,560,675)	(613,199,890)	19.53
JUMLAH ASET TETAP	3,539,858,822	3,888,780,662	(348,921,840)	(8.97)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	235,450,000	(235,450,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(235,450,000)	235,450,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	3,597,860,459	3,959,322,004	(361,461,545)	(9.13)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	49,538,170	59,420,816	(9,882,646)	(16.63)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	49,538,170	59,420,816	(9,882,646)	(16.63)
JUMLAH KEWAJIBAN	49,538,170	59,420,816	(9,882,646)	(16.63)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,548,322,289	3,899,901,188	(351,578,899)	(9.02)
JUMLAH EKUITAS	3,548,322,289	3,899,901,188	(351,578,899)	(9.02)
JUMLAH EKUITAS	3,548,322,289	3,899,901,188	(351,578,899)	(9.02)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,597,860,459	3,959,322,004	(361,461,545)	(9.13)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

PALOPO, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAF'AN WIDIARSO RAFID
NIP 197408071995031001